

Peningkatan Kompetensi Pendidikan Kesehatan Masyarakat Melalui Penguatan Peran Institusi Pendidikan Kesehatan Masyarakat

Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas
diterbitkan oleh:
Program Studi S-1 Kesehatan Masyarakat
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas
p-ISSN 1978-3833
8(2)53-54
@2014 JKMA
<http://jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/>

Defriman Djafri¹ ✉

¹Bagian Epidemiologi & Biostatistik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, Padang

Pendidikan kesehatan masyarakat pada saat ini sangat berkembang pesat dikarenakan kebutuhan akan sumber daya kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kompetensi pendidikan kesehatan masyarakat sangat penting untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan profesional. Institusi pendidikan kesehatan masyarakat merupakan wadah di dalam menyusun dan merumuskan kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Peran institusi sangat penting dalam meningkatkan kompetensi pendidikan kesehatan masyarakat.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada institusi penyelenggara program pendidikan Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM), khususnya dalam hal menjamin mutu lulusan, diperlukan standarisasi mutu lulusan. Untuk itu perlu diimplementasikan uji kompetensi yang bermutu sebagai bagian dari proses evaluasi pembelajaran yang terintegrasi dalam sistem pendidikan. Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi.⁽¹⁾

Peran institusi pendidikan kesehatan masyarakat sangat penting menentukan arah dan juga pengembangan profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat. Beberapa peran institusi pendidikan kesehatan masyarakat yang perlu diupayakan adalah standarisasi kurikulum nasional, penguatan sistem penjamin mutu internal, pengembangan standar kompetensi sarjana kesehatan masyarakat, meningkatkan fasilitas prodi dan institusi dari asosiasi insti-

tusi pendidikan tinggi kesehatan masyarakat atau lembaga akreditasi mandiri.

Peran dan upaya yang diuraikan diatas perlu dukungan asosiasi institusi dan organisasi profesi kesehatan masyarakat. Permasalahan terjadi diantara program studi dan institusi pendidikan kesehatan masyarakat di daerah, sangat minim mendapatkan fasilitasi mengenai sistem penjamin mutu dan fasilitasi pengembangan prodi. Fungsi asosiasi institusi perngguruan tinggi kesehatan masyarakat tidak hanya sebagai wadah perkumpulan, tetapi prodi atau institusi yang baik atau yang unggul dapat memberikan fasilitasi dalam pengembangan prodi-prodi atau institusi di daerah yang masih tergolong cukup. Peran ini dapat dilakukan dalam rangka pembinaan agar bermutu baik dan meningkatkan hasil akreditasi prodi dan institusi.

Standar kurikulum sarjana kesehatan masyarakat harus segera ditetapkan secara nasional. Kurikulum nasional merupakan rujukan bagi prodi-prodi dan pengelola dalam menentukan standar lulusan secara nasional. Landasan selama ini ada 8 kompetensi lulusan bagi seorang sarjana kesehatan masyarakat, (1) mampu melakukan kajian dan analisis situasi (analytic/assessment skills) (2) Mampu mengembangkan kebijakan dan Perencanaan Program (policy development/program planning skills) (3) Mampu Berkomunikasi Secara Efektif (communication skills) (4) Mampu memahami budaya setempat (cultural competency skills) (5) Mampu melaksanakan pem-

✉ **Korespondensi Penulis:**

Bagian Epidemiologi dan biostatistik, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas, Padang
Email : defrimandjafri@fkm.unand.ac.id

berdayaan Masyarakat (community empowerment) (6)Memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat (public health science skills) (7) Mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen (financial planning and management skills) (8) Memiliki kemampuan kepemimpinan dan berfikir sistem (leadership and system thinking skills). Beban kurikulum dibagimenjadi 2, yakni 70% dari 144 SKS wajib program studi yang terdiri dari kurikulum nasional dan muatan lokal, dan 30% mata kuliah wajib peminatan.

Selain kurikulum, standar kompetensi secara nasional perlu ditetapkan agar lulusan dapat menjalankan praktek di masyarakat dan di tempat kerja secara kompeten. Daya saing lulusan secara global juga menjadi alasan standar kompetensi diterapkan melauai ujian kompetensi. Institusi pendidikan kesehatan masyarakat dengan profesi kesehatan masyarakat juga harus memikirkan kedepan untuk menyiapkan sertifikat profesi kesehatan masyarakat. Sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi merupakan dua hal yang diperlukan nanti kedepan untuk proses registrasi ketika lulusan menjadi seorang tenaga kesehatan masyarakat.

Penguatan peran institusi sebagai wadah lembaga/institusi pendidikan memang sangat diperlukan untuk peningkatan mutu dan daya saing lulusan secara nasional dan global. Tuntutan pengguna dan tantangan kedepan menjadi landasan pengelola untuk berperan secara nyata dalam mengembangkan kurikulum, kompetensi, serta sistem penguatan mutu pendidikan. Standarisasi kurikulum dan kompetensi yang akan dihasilkan, menjadikan acuan secara nasional dan menjadikan bekal bagi lulusan yang mampu bersaing secara nasional dan global.

Daftar Pustaka

1. AIPTKMI, Naskah Akademik Pendidikan Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Aiptkmi; 2012